

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang bagaimana konflik bersenjata dan ketegangan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara mempengaruhi lingkungan di Semenanjung Korea. Dampak yang akan dianalisis meliputi pengaruh uji coba senjata, persiapan militer, dan konfrontasi yang dapat merusak ekosistem, terutama dalam bentuk kerusakan fisik seperti tanah yang rusak akibat ledakan atau aliran sungai yang tercemar oleh bahan kimia. Konflik Korea Utara dan Selatan telah berlangsung sejak pecahnya Korea menjadi dua negara berdaulat setelah Perang Dunia II. Pemisahan ini disebabkan oleh konflik ideologi Liberal-Demokratis dan Komunis-Sosialis antara Blok Barat (Amerika) dan Blok Timur (Uni Soviet). Konflik ini telah menyebabkan ketegangan yang terus meningkat, termasuk uji coba senjata nuklir Korea Utara dan persiapan militer Korea Selatan.

Ketidakstabilan politik dan ketegangan yang terus berlanjut antara Korea Selatan dan Korea Utara sangat mempengaruhi kebijakan lingkungan hidup. Hal ini menghambat kerja sama dalam isu-isu lingkungan dan upaya pembangunan berkelanjutan. Instabilitas politik ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ada perbedaan ideologi. Korea Selatan menganut demokrasi dan liberalisme, yang dipengaruhi oleh Amerika Serikat, sementara Korea Utara dipengaruhi oleh komunisme dari era Uni Soviet dan memiliki ideologi Juche. Ideologi Juche menekankan pada prinsip kemandirian dan ketidaktergantungan pada kepentingan politik negara lain (Abidin, 2020). Selain itu, perpecahan menjadi dua negara menyebabkan perbedaan yang sangat jelas dalam aspek sosial, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat di Korea Utara dan Korea Selatan.

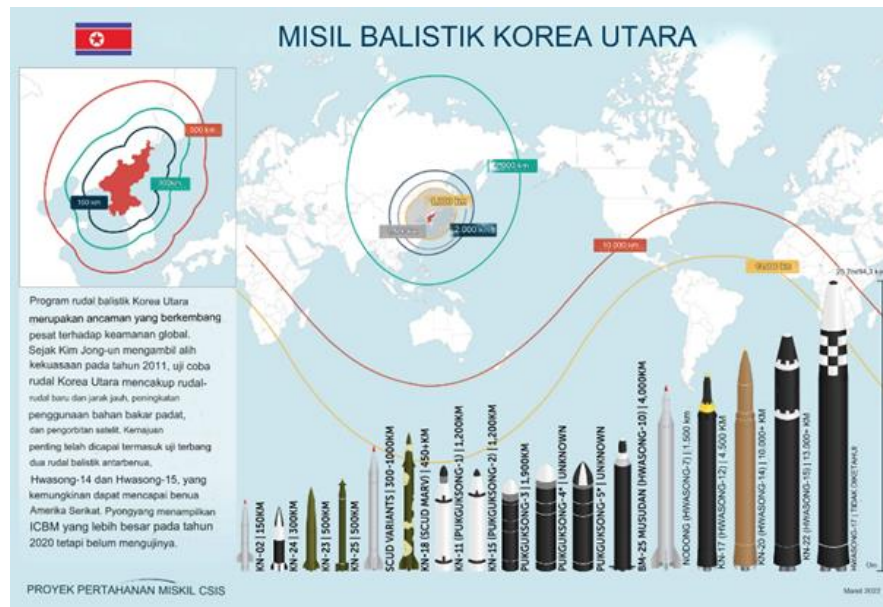
Faktor kedua adalah konflik militer yang telah dibahas oleh berbagai jurnal dan media internasional. Korea Selatan bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam pelatihan militer, sementara Korea Utara meningkatkan pengembangan nuklir dan kerja sama militernya dengan Rusia. Ketegangan antara kedua Korea ini merugikan kedua belah pihak, terutama dalam hal kerusakan lingkungan seperti polusi air, laut, dan udara. Contoh kasusnya, Korea Utara pernah menembakkan rudal balistik di lepas pantai timur, yang meskipun jatuh di wilayah perairan internasional, tetap berdampak negatif terhadap hubungan mereka dengan Korea Selatan (George Wright, 2023). Tindakan ini membuat Korea Selatan semakin memandang negatif Korea Utara, yang tentu saja menghambat upaya reunifikasi kedua negara yang hingga kini masih berjalan dengan lambat dan minim kemajuan.

Sejak Oktober 2006, Korea Utara telah melakukan banyak uji coba rudal balistik (Council on Foreign Relations, 2022). Rudal-rudal ini diluncurkan ke berbagai wilayah, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang (Puspoayu & Paramitha, 2023), Laut Timur (George Wright, 2023), Thongchang-ri, dan Punggye-ri (Council on Foreign Relations, 2022). Peluncuran rudal di ZEE Jepang merupakan ancaman serius terhadap keselamatan nelayan, pencemaran air, ekosistem laut, serta navigasi udara dan laut di wilayah tersebut (Puspoayu & Paramitha, 2023). Thongchang-ri adalah salah satu lokasi uji coba nuklir di Korea Utara, namun belum ada informasi spesifik tentang dampak lingkungan di sana. Lokasi ini diyakini penting dalam pengembangan rudal balistik antarbenua oleh Korea Utara (Nikkei Asia). Punggye-ri adalah lokasi uji coba nuklir keenam dan terkuat di Korea Utara. Namun, pada 20 April 2018, Kim Jong Un setuju untuk menutup lokasi ini dan mengizinkan sejumlah jurnalis internasional menyaksikan upacara penutupannya yang berlangsung pada 23-25 Mei 2018 (Ripley, Schwarz, dan Devitt, 2018).

Menurut laporan dari website CSIS, citra satelit terbaru menunjukkan adanya aktivitas baru di Fasilitas Uji Nuklir Punggye-ri. Terlihat dua bangunan kecil baru dibangun di depan portal yang runtuh, dengan kabel yang mengalir dari bangunan tersebut ke dalam portal terowongan nomor 3. Selain itu, ada *drainase* air dari portal tersebut karena terowongannya miring. Meskipun aktivitas ini belum menunjukkan adanya uji coba nuklir di Punggye-ri, tetap ada kemungkinan bahwa fasilitas tersebut akan digunakan untuk uji coba di masa depan (Jr., Cha, & Jun, 2023).

Kebijakan politik Korea Utara menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk terus mengembangkan produksi rudal balistik. Hal ini terbukti dari upaya mereka dalam mengembangkan rudal balistik sebagai alat pengiriman nuklir. Korea Utara telah banyak berinvestasi dalam pengembangan rudal balistik jarak jauh dan miniaturisasi nuklir, yang terlihat dari jenis misil balistik yang mereka produksi (CSIS, 2022). Meskipun ada sanksi dari Dewan Keamanan PBB, Korea Utara tetap mengembangkan program senjata nuklir dan rudalnya (Puspoayu & Paramitha, 2023). Mereka telah membuat kemajuan dalam teknologi rudal jarak jauh, seperti uji coba pertama rudal balistik antarbenua, Hwasong-14, pada Juli 2017, yang diikuti oleh uji coba desain ICBM yang lebih berat, Hwasong-15, pada November 2017 (CSIS, 2022). Menanggapi kebijakan Korea Utara yang terus meningkatkan senjata nuklir, Korea Selatan juga mengambil langkah-langkah untuk mencegah agresi Korea Utara. Langkah-langkah tersebut termasuk latihan militer bersama dengan Amerika Serikat dan Jepang, mengembangkan strategi anti-rudal yang komprehensif, dan meningkatkan kemampuan pertahanan rudal nasional (CNN Indonesia, 2023).

Gambar.1. Jenis Rudal Balistik Korea Utara



Sumber : <https://missilethreat.csis.org/country/dprk/>

Pada 3 September 2017, Korea Utara melakukan uji coba nuklir yang menyebabkan longsor di Gunung Mantap. Analisis dari 38 North menunjukkan bahwa longsor dan kerusakan tanah kali ini lebih luas dibandingkan dengan uji coba sebelumnya. Uji coba tersebut memicu gempa berkekuatan 5,2 skala Richter, yang bahkan terasa hingga di wilayah Cina (BBC, 2017). Ledakan nuklir ini menggeser sisi puncak Gunung Mantap sejauh 3,5 meter. Para peneliti menggunakan radar pencitraan satelit SAR (synthetic aperture radar) untuk memantau perubahan permukaan gunung dan menentukan lokasi serta kekuatan ledakan nuklir dengan lebih akurat (Roberts Sanders, 2018).

Dampak pergeseran pada Gunung Mantap disebabkan oleh uji coba nuklir bawah tanah yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 3 September 2017. Pada Penelitian yang

dilakukan menggunakan citra radar satelit untuk menentukan pola pergerakan horizontal divergen dengan kedalaman hingga 3.5 meter dan penurunan permukaan sebesar 0.5 meter yang terkait dengan uji coba nuklir tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ledakan nuklir menyebabkan penurunan yang terkait dengan runtuhnya bawah permukaan dan pemadatan aseismik batuan yang rusak di lokasi uji coba. Selain itu, penelitian ini juga memperkirakan kekuatan ledakan nuklir sekitar 120-304 kiloton TNT setara dan menunjukkan kemampuan pemantauan uji coba nuklir bawah tanah menggunakan pengamatan jarak jauh dari satelit dan sensor seismik. Ini menunjukkan bahwa uji coba nuklir bawah tanah memiliki dampak yang signifikan pada pergeseran gunung Mantap. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terjadi proses kolaps dan kompaksi di bawah permukaan yang menyebabkan longsor di sekitar lokasi uji coba nuklir. (Teng, dkk, 2018).

"Combining insight from geodetic and seismological remote sensing, we found that the aftermath of the initial explosive deformation involved subsidence associated with subsurface collapse and aseismic compaction of the damaged rocks of the test site." (Teng, dkk, 2018).

“Menggabungkan wawasan dari penginderaan jarak jauh geodetik dan seismologi, kami menemukan bahwa akibat dari deformasi eksplosif awal melibatkan penurunan tanah yang terkait dengan keruntuhan di bawah permukaan dan pemadatan aseismik pada bebatuan yang rusak di lokasi pengujian.” (Teng, dkk, 2018).

Penelitian oleh Teng dan timnya memberikan wawasan baru tentang mekanisme deformasi akibat uji coba nuklir bawah tanah Korea Utara pada 3 September 2017. Dampak ledakan nuklir tersebut mencakup penurunan permukaan, runtuhnya bawah permukaan, dan

pemadatan batuan yang rusak di lokasi uji coba. Penelitian ini memperkirakan kekuatan ledakan sekitar 120-304 kiloton TNT setara dan menunjukkan kemampuan untuk memantau uji coba nuklir bawah tanah melalui pengamatan satelit dan sensor seismik. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya perdamaian dunia dengan mematuhi perjanjian pengujian nuklir yang dinegosiasikan secara internasional.

Gambar.2. Kondisi Gunung Mantap Setelah Uji Nuklir



Sumber : Berkeley 2018.

Ket: Gambar Gunung Mantap di Korea Utara di Google Earth menampilkan lokasi enam uji coba bom nuklir negara tersebut, termasuk uji coba terbesar yang dilakukan pada 3 September 2017, yang mengakibatkan gunung menurun sebesar 20 inci.

Berbagai kebijakan politik yang diambil oleh Korea Utara terkait peningkatan uji coba nuklir telah menimbulkan kekhawatiran bagi Korea Selatan. Untuk menanggapi hal ini, Korea Selatan meningkatkan kualitas militernya dengan beraliansi bersama Amerika Serikat. Aliansi ini telah terjalin sejak pasca perang dingin di Semenanjung Korea dan masih berlanjut hingga

kini (Council on Foreign Relations, 2022). Selain itu, dibentuklah KTT Trilateral antara AS, Jepang, dan Korea Selatan yang menangani berbagai isu seperti perencanaan darurat, pertahanan rudal, keamanan ekonomi, rantai pasokan, teknologi baru, bantuan pembangunan, dan melawan disinformasi (CSIS, 2023).

Keputusan untuk melakukan latihan militer dan mengembangkan sistem pertahanan rudal sebagai bagian dari kerja sama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat berdampak negatif terhadap lingkungan. Kehadiran pangkalan militer AS di Korea Selatan telah menyebabkan degradasi lingkungan, seperti kerusakan hutan, penurunan kesuburan tanah, dan keracunan air tanah ke tingkat yang sangat berbahaya. Militer merupakan salah satu konsumen bahan bakar terbesar di dunia dan menyumbang 5,5% emisi gas rumah kaca global, menurut perkiraan para ahli internasional pada tahun 2022 (Mcfarlane dan Volcovici, 2023). Ironisnya, emisi militer di luar negeri, mulai dari pesawat jet, kapal, hingga latihan militer, tidak termasuk dalam Protokol Kyoto tahun 1997 tentang pengurangan gas rumah kaca dan juga dikecualikan dari perjanjian Paris tahun 2015 dengan alasan bahwa data penggunaan energi oleh militer dapat membahayakan keamanan nasional (Mcfarlane dan Volcovici, 2023). Singkatnya, kebijakan yang diambil oleh kedua pihak pasti meningkatkan ketegangan dan berdampak negatif pada kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea.

Dalam Teori Sekuritisasi, sebagaimana dikembangkan oleh *Copenhagen School*, menyatakan bahwa keamanan bukanlah kondisi objektif, melainkan konstruksi sosial yang muncul melalui wacana (Holger Stritzel, 2014). Teori ini berfokus pada bagaimana isu-isu disajikan sebagai ancaman eksistensial, yang kemudian membenarkan penerapan langkah-langkah luar biasa di luar batasan normal prosedur politik. Proses ini melibatkan "tindak tutur" oleh aktor yang melakukan sekuritisasi, yang diterima oleh *audiens*, yang mengarah pada sekuritisasi isu tersebut. Dalam konteks Semenanjung Korea, proses sekuritisasi dapat diamati

dalam degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh ketidakstabilan politik. Upaya Korea Utara untuk mengembangkan rudal nuklir dan balistik, ditambah dengan kerja sama militer Korea Selatan serta aliansi Korea Selatan dengan AS dan Jepang telah menyebabkan meningkatnya ancaman keamanan lingkungan, yang pasti hal ini sangat merugikan lingkungan.

Isu-isu lingkungan ini bukan sekadar produk sampingan dari aktivitas militer, tetapi juga disekuritisasi dengan sendirinya. Degradasi lingkungan dapat dibingkai sebagai ancaman keamanan, karena memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penduduk, yang berpotensi menyebabkan keresahan sosial dan ketidakstabilan lebih lanjut (Holger Stritzel, 2014). Pendekatan Copenhagen School akan menunjukkan bahwa para pelaku di dalam dan di luar Semenanjung Korea dapat mengamankan isu-isu lingkungan ini, sehingga mengangkatnya ke tingkat yang membutuhkan tindakan mendesak dan luar biasa.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bagaimana kebijakan politik dari kedua negara membuktikan keduanya saling menanggapi tanpa mempertimbangkan bagaimana dampak yang akan terjadi pada kondisi lingkungannya, apalagi wilayah yang dijadikan korea utara sebagai tempat uji coba nuklir yang pastinya menyebabkan partikel radioaktif menyebar jauh dan luas, mencemari tanah dan udara. Singkatnya dampak uji coba nuklir terhadap lingkungan atmosfer, perairan, dan bawah tanah dari upaya yang dilakukan untuk menelusuri batasan spasial dari lokasi yang paling terkontaminasi di seluruh dunia, mencatat paparan manusia yang telah menyebabkan peningkatan signifikan kejadian kanker tiroid secara lokal dan regional (Prävālie, 2014), Pengujian nuklir di darat dapat menyebabkan tanah longsor dan gangguan geologi lainnya, serta mencemari tanah dan udara akibat pelepasan bahan radioaktif (Walsh, 2022). Pengujian kontaminasi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkepanjangan, termasuk kontaminasi tanah dan udara dengan limbah radioaktif yang dapat bertahan selama ribuan tahun (ICAN, 2020). Pengujian nuklir dapat menyebabkan kerusakan

pada ekosistem dan keanekaragaman hayati, serta dapat membahayakan kesehatan manusia (Nations, 2020).

Untuk itu, penting sekali memahami dampak ketidakstabilan politik antara Korea Utara dan Korea Selatan terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea, dimana perlu ada pemahaman tentang situasi politik dan keamanan di wilayah Semenanjung Korea ini guna mengembangkan strategi dan kebijakan yang efektif guna memitigasi tantangan lingkungan hidup dan mendorong pembangunan berkelanjutan di Semenanjung Korea. Dalam permasalahan di Semenanjung Korea ini, ketidakstabilan politik dan konfrontasi militer dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan, seperti polusi air, laut, dan udara, yang merupakan masalah transnasional yang memerlukan kerjasama antarnegara. Tindakan seperti penembakan rudal balistik oleh Korea Utara ke laut, meskipun tidak mengenai wilayah Korea Selatan secara langsung, dapat menambah ketegangan dan menghambat upaya-upaya diplomatik dan kerjasama lingkungan yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu lingkungan bersama.

Paradigma *environmental peacebuilding* menyerukan pendekatan yang berorientasi pada solusi bersama dan keuntungan bersama, yang dapat membantu mengurangi konfrontasi dan membangun kepercayaan antara kedua belah pihak (Anaïs, dkk.,2019). Dengan fokus pada lingkungan sebagai area kerjasama, kedua Korea dapat mengembangkan proyek-proyek bersama yang tidak hanya menguntungkan lingkungan tetapi juga dapat membantu mengurangi ketegangan dan mendorong reunifikasi. Namun, untuk menerapkan paradigma ini, diperlukan langkah-langkah yang konkret dan komitmen dari kedua belah pihak untuk memulai dialog dan kerjasama lingkungan yang serius. Ini dapat dimulai dengan proyek-proyek kecil yang dapat membangun kepercayaan dan menunjukkan manfaat kerjasama, yang kemudian dapat berkembang menjadi kerjasama yang lebih luas dan mendalam.

Hal ini penting sebab ketidakstabilan kondisi politik dan keamanan di Semenanjung Korea saat ini menjadikan Korea Utara dan Korea Selatan bersaing untuk memaksimalkan kapabilitas keamanan negaranya agar bisa terhindar dari dominasi satu sama lain. Upaya untuk meningkatkan kemampuan militer mereka jelas sangat berdampak negatif pada lingkungan hidup di Semenanjung Korea. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan judul penelitian “Dampak instabilitas politik Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea”. Singkatnya penelitian ini menunjukkan bahwa situasi politik dan keamanan di Semenanjung Korea dapat mempengaruhi kelestarian lingkungan dan merusak keberlanjutan lingkungan di Semenanjung Korea.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, terlihat instabilitas politik antara Korea Utara-Korea Selatan sangat berdampak pada keamanan dan kelestarian lingkungan Semenanjung Korea. Korea Utara bersikukuh untuk tetap mengembangkan nuklirnya, dimana hal tersebut membuat instabilitas politik dengan Korea Selatan terus berkembang. Uji coba rudal balistik dan senjata nuklir yang dilakukan Korea Utara memunculkan kekhawatiran mengenai keamanan dan kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea. Sebaliknya Korea Selatan yang juga membentuk kerja sama militer dengan AS dan Jepang akibatnya timbul kerusakan lingkungan di area pangkalan militer serta berdampak pada instabilitas politik. Dampak yang terjadi akibat uji coba senjata nuklir Korea Utara dan latihan militer Korea Selatan merusak lingkungan hidup di Semenanjung Korea. Oleh sebab itu peneliti mengangkat pertanyaan penelitian yakni “bagaimana dampak instabilitas politik Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan hidup di Semenanjung Korea?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui dampak instabilitas politik Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang instabilitas politik antara Korea Selatan dan Korea Utara dan dampaknya terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hubungan internasional terutama di bidang studi lingkungan, kajian keamanan regional dan politik antar negara. Penelitian ini juga dapat membantu pengembangan pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan antara politik dan lingkungan, selain itu juga dapat memberikan dasar bagi pengembangan kursus dan program akademik yang fokus pada isu-isu lingkungan dalam konteks konflik politik. Ini dapat membantu pendalaman pendidikan generasi mendatang tentang pentingnya pelestarian lingkungan dalam situasi konflik.

1.4.2. Manfaat praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai panduan bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan melaksanakan kebijakan lingkungan yang lebih efektif, sebab dapat hal ini dapat menjadi referensi untuk perumusan strategi untuk mengurangi dampak negatif konflik politik terhadap lingkungan. Selain itu, informasi dari penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu lingkungan di Semenanjung Korea. Ini dapat memotivasi masyarakat untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mendorong perubahan

perilaku yang lebih ramah lingkungan. Penelitian ini juga dapat bermanfaat sebagai bahan rujukan referensi bagi penelitian lanjutan mengenai isu yang sama.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang instabilitas politik Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama serta metode penelitian yang menjelaskan tentang penelitian yang relevan dengan topik penelitian peneliti, teori yang digunakan dalam menjawab persoalan yang diangkat, kerangka pemikiran sebagai alur berpikir peneliti mengenai masalah instabilitas politik Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan di Semenanjung Korea, hipotesis serta metode yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III KEBIJAKAN POLITIK KOREA SELATAN DAN KOREA UTARA

Pada bab ini peneliti akan menganalisis mengenai gambaran umum konflik Korea Selatan-Korea Utara, komprasionitas ideologi politik Korea Selatan dan Korea Utara, serta kebijakan politik Korea Selatan dan Korea Utara.

BAB IV INSTABILITAS POLITIK KOREA SELATAN-KOREA UTARA TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN DI SEMENANJUNG KOREA

Pada bab ini peneliti ingin mendeskripsikan dan menganalisis kondisi instabilitas politik di Semenanjung Korea, uji coba nuklir Korea Utara dan latihan militer Korea Selatan dengan Amerika dan Jepang terhadap kelestarian lingkungan dan dampak instabilitas politik di Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan hidup di Semenanjung Korea secara rinci.

BAB V RENCANA PENUTUP

Pada bab ini akan mencakup kesimpulan dan saran atas hasil penelitian mengenai instabilitas politik di Korea Selatan-Korea Utara terhadap kelestarian lingkungan hidup di Semenanjung Korea.

